

Jenis Berkas	: Pers Rilis	No. Arsip	: PR.AGustus.15/6
Judul	: Penyerapan Anggaran APBD Riau	Tanggal	:08 Agustus 2015
Sub Judul	: Fitra Prediksi Penyerapan Hanya 61% hingga akhir tahun	Tahun	: 2015
	: Birokrasi Amburadul Rugikan Rakyat	Penulis	: Tarmizi / FITRA RIAU*

Press Rilis

Fitra Riau Predisik Penyerapan APBD Riau 2015 Hanya 61 % Birokrasi “Amburadul”, Rugikan Rakyat

Fitra Provinsi Riau memprediksi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau 2015, hanya mampu teralisasi 61% hingga akhir tahun 2015. Fitra Riau menilai kinerja pengelolaan birokrasi tahun ini sama seperti tahun sebelumnya 2014, bahkan lebih buruk. Kondisi terulang setiap tahun ini menunjukkan kinerja birokrasi pemerintah provinsi Riau “Amburadul”, dan merugikan masyarakat banyak.

Demikian dikatakan Usman, Koordinator Forum Indoensia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) provinsi Riau. “kami memprediksi tahun 2015 ini, pemerintah povinsi Riau hanya mampu merealisasikan belanja daerah yang telah direncanakan dalam APBD hanya sebesar 61%. Predikisi ini lebih buruk dari tahun 2014 yaitu sebesar 63% dari total belanja daerahnya” jelas Usman.

APBD 2015, merencanakan belanja daerah sebesar RP. 10,7 triliun. Berdasarkan potensi realisasi yang hanya mampu 6,1% maka diprediksi SILPA dari belanja daerah yang tidak terserap bisa tembus mencapai Rp. 4,5 triliun ditahun ini. Prediksi SILPA ini belum yang berasal dari realisasi pendapatan yang juga dimungkinkan melebihi target yang ditentukan.

Temuan prediksi tersebut berasal dari perhitungan kondisi realisasi program dan kegiatan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah daerah melalui SKPD. Khususnya dalam belanja modal, barang jasa pada komponen belanja langsung. Namun, perhitungan ini juga berasal dari potensi penyerapan anggaran pada belanja tidak langsung (Pegawai, Tranfer dan Bantuan keuangan, hibah dan bantuan sosial. Perhitungan ini juga berdasarkan pada potensi realisasi tahun 2014 yang diperoleh dari LKPD Provinsi Riau tahun 2015.

Hingga 31 Agustus 2015 ini, yang merupakan triwulan ke tiga tahun 2015, belanja modal yang dilelang melalui Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Provinsi Riau, yaitu sebesar Rp. 1,7 triliun atau 59,76% dari belanja modal yang dianggarkan dalam APBD Riau sebesar Rp. 2,9 triliun. Selanjutnya untuk barang dan jasa, sebesar Rp. 193,9 milyar atau 6,19% dari total belanja barang dan jasa tahun 2015 sebesar Rp. 3,1 triliun.

Untuk itu, maka diperkirakan potensi penyerapan anggaran pada belanja langsung terhadap total belanja langsung adalah sebesar 45%, atau sebesar Rp. 1,9 triliun dari total belanja langsung sebesar Rp. 4,3 triliun. 45% tersebut 30 % dari proses lelang, 15% nya merupakan pengadaan tanpa melalui mekanisme lelang.

“Ini baru dilelang, belum tentu terealisasi, namun kami menganggap yang telah dilelang berpotensi besar untuk teralisasi”, sebutnya.

Untuk belanja tidak langsung, dihitung berdasarkan realisasi tahun 2014 lalu. Perkiraan belanja tidak langsung mampu terserap cukup tinggi sebesar 85% atau sekitar Rp. 3,7 Triliun dari total 4,4 triliun, dengan masing-masing item belanja tidak langsung terserap sebesar 85% jika mengacu pada realisasi Belanja Tidak Langsung tahun 2014.

Jadi dari total belanja daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 10,7 triliun, maka akan diprediksi terserap 61%, atau Rp. 6,2 Triliun. Terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 2,8 Triliun (45%) dari total belanja langsung Rp. 6,3 triliun. Selanjutnya penyerapan belanja tidak langsung 85%, yaitu Rp. 3,7 triliun dari total belanja tidak langsung Rp. 4,4 triliun. Penumpukan SILPA diakhir tahun dari belanja daerah diprediksikan Rp. 4,5 Triliun.

Usman mengatakan, buruknya pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan daerah oleh Birokrasi Pemerintah Provinsi Riau, merupakan bentuk sistem birokrasi pemerintah daerah yang amburadul, tidak kredibel dan merugikan rakyat. Karena, kondisi seperti ini terjadi berturut-turut setiap tahun.

Seharusnya pemerintah daerah Provinsi harus lebih baik dalam menjalankan fungsi mendistribusikan, melaksanakan dan menjalankan program pembangunan. Karena pemerintah provinsi Riau merupakan penopang pembangunan Daerah Riau. 28%-30% biaya pembangunan daerah Riau itu, dikelola oleh pemerintah Provinsi. Namun kondisi yang seperti ini menunjukkan pula bahwa provinsi Riau gagal menjadi penopang pembangunan daerah.

Untuk itu, sebut Usman, FITRA Riau merekomendasikan kepada pemerintah dan DPRD Riau, untuk :

- APBD Perubahan 2015 tidak perlu lagi dibahas oleh pemerintah dan DPRD. Karena hal itu justru akan membuang-buang waktu dan tidak akan memperbaiki serapan anggaran. Apalagi ada rencana penambahan anggaran dan kegiatan baru yang dialokasikan dalam APBD perubahan 2015 ini. Justru itu akan memperburuk kondisi pengelolaan keuangan.
- Pemerintah dan DPRD Fokus saja memperbaiki sistem birokrasi dan manajemen pengelolaan program dan anggaran di setiap SKPD. Apalagi ada informasi perubahan SOTK baru, karena SOTK saat ini belum sesuai dengan perintah UU.
- Pemerintah dan DPRD fokus saja membahas rencana kegiatan dan anggaran tahun 2016. Penyelesaian rancangan APBD 2016, dipercepat dan dirancanag sebaik mungkin, baik dari segi program dan anggaran sampai ke teknis pelaksanaan/penataan usahanya. Sehingga tidak akan terjadi lagi birokrasi yang amburadul. Januari 2016 semua program dan kegiatan sudah dapat dilaksanakan.
- Pemerintah dan DPRD membuat sistem monitoring penyerapan anggaran yang lebih transparan, akuntabel. Sehingga penyerapan anggaran dapat dimonitoring dan dievaluasi setiap sewaktu-waktu, bahkan perhari. Jadi tidak ada SKPD yang lengah dalam menjalankan kegiatan dan program dan tidak harus menunggu evaluasi di akhir semester.